

**ANALISIS KOMPARASI PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT PADA ERA PRA DAN  
SELAMA PANDEMI COVID-19**

TUGAS AKHIR

*Diajukan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)  
sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh

**NAMA : YULIA DELMA WITA**

**NIM : 19133097**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

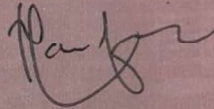
**2023**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

ANALISIS KOMPARASI PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT PADA ERA PRA DAN  
SELAMA PANDEMI COVID-19

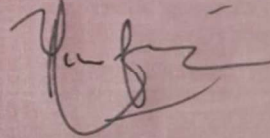
Nama : Yulia Delma Wita  
BP/NIM : 19133097/2019  
Departemen /Prodi : D3 Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi

Diketahui Oleh :  
Koordinator Program Studi  
DIII Akuntansi



Halkadri Fitra, SE, MM, Ak  
NIP. 19800809 201012 1 003

Padang, 06 Juni 2023  
Disetujui Oleh :  
Pembimbing



Halkadri Fitra, SE, MM, Ak  
NIP. 19800809 201012 1 003

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

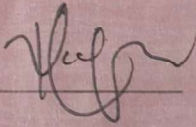
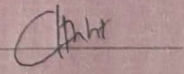
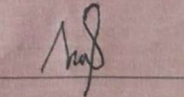
ANALISIS KOMPARASI PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT PADA ERA  
PRA DAN SELAMA PANDEMI COVID-19

Nama : Yulia Delma Wita  
BP/NIM : 19133097/2019  
Departemen /Prodi : D3 Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi

*Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Program  
Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*

Padang, 06 Juni 2023

Tim Penguji

Nama		Tanda Tangan
1. Halkadri Fitra, SE, MM.Ak	(Ketua)	
2. Mayar Afriyenti, SE, M.Sc	(Anggota)	
3. Mia Angelina Setiawan, SE, M.Si	(Anggota)	

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yulia Delma Wita  
Thn.Masuk/NIM : 2019/19133097  
Tempat/Tgl.Lahir : Buluh Kasok/29 Januari 1999  
Program Studi : D3 Akuntansi  
Keahlian : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Jalan Walet No.11, Air Tawar Barat, Padang  
Utara, Padang.  
Judul Tugas Akhir : Analisis Komparasi Penerimaan Retribusi  
Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat  
pada Era Pra dan Selama Pandemi Covid-19

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Mei 2023  
Yang menyatakan,



Yulia Delma Wita  
Nim.19133097

## ABSTRAK

**Yulia Delma Wita : Analisis Komparasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada Era Pra dan Selama Pandemi Covid-19**

**Pembimbing : Halkadri Fitra, SE,MM,Ak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rasio efektivitas, efisiensi, kontribusi, laju pertumbuhan dan rata-rata pertumbuhan penerimaan retribusi daerah di Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2021, dimana permasalahan terlihat bahwa dampak pandemi mempengaruhi perekonomian manusia termasuk penerimaan retribusi daerah. Oleh karena itu, penulis penasaran melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif, dengan mengambil data di Website Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sumatera Barat yaitu Catatan atas Laporan Keuangan pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Rasio efektivitas penerimaan retribusi daerah di kabupaten/kota Sumatera Barat masih banyak yang belum mampu masuk kriteria sangat efektif. 2) Rasio efisiensi penerimaan retribusi daerah di kabupaten/kota Sumatera Barat rata-rata sudah masuk kriteria efisien. 3) Rasio kontribusi penerimaan retribusi daerah di kabupaten/kota Sumatera Barat belum mampu masuk kriteria sangat baik. 4) Rasio laju pertumbuhan penerimaan retribusi daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat tidak memenuhi kriteria sangat berhasil. 5) Rasio rata-rata pertumbuhan penerimaan retribusi daerah di Provinsi Sumatera Barat terjadi penurunan dari masa sebelum pandemi 2018-2019 ke masa selama pandemi 2020-2021.

**Kata Kunci : Efektivitas, Efisiensi, Kontribusi, Laju Pertumbuhan, Rata-Rata Pertumbuhan, Retribusi Daerah, Pandemi Covid-19**

## KATA PENGANTAR



Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“Analisis Komparasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat Pada Era Pra Dan Selama Pandemi Covid-19”**. Tugas Akhir ini di kerjakan demi memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada program studi Akuntansi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini bukanlah tujuan akhir dari belajar karena belajar adalah sesuatu yang tidak terbatas.

Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Terima kasih kepada Allah SWT yang telah menolong, mempermudah segala urusan dan mengabulkan semua Do'a, sehingga bisa menyelesaikan Program Studi Diploma III Akuntansi dan memperoleh gelar Madya di Universitas Negeri Padang.
2. Teristimewa penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua dan keluarga atas doa dan kasih sayangnya serta memberikan semangat yang tidak pernah putus dalam memberikan dukungan lahir dan batin dalam perkuliahan dan penyusunan Tugas Akhir ini.

3. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Halkadri Fitra, SE, MM. Ak selaku ketua Prodi Diploma Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, sekaligus sebagai dosen pembimbing Tugas Akhir dan pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, megarahkan, memberi saran kepada penulis dalam mengerjakan tugas akhir ini sampai selesai.
5. Kepada Kantor Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
6. Seluruh dosen pengajar jurusan Diploma Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama duduk dibangku kuliah.
7. Bapak dan Ibu staff pegawai dan karyawan program studi Diploma Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah membantu penulis selama ini.
8. Pustakawan/wati Universitas Negeri Padang.
9. Teman-teman seperjuangan, Windy, Pia, Nia, Dila, Fauziah, Hani, Difa, Yana dan teman-teman lainnya yang telah memberikan dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan selama kuliah.
10. Sinta dan Mella, Sahabat seperjuangan yang telah memberikan semangat dan doa dalam penyusunan tugas akhir ini.

11. Teman-teman mahasiswa angkatan 2019 yang telah membantu penulis dan memberikan dukungan dalam penyusunan tugas akhir.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan tugas akhir ini.
13. Dan yang terakhir kepada diriku sendiri, terima kasih banyak karena telah kuat dan mampu bertahan sampai sejauh ini.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan Tugas Akhir ini baik dalam teknik penyajian materi maupun pembahasan. Demi kesempurnaan Tugas Akhir ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Penulis juga berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan pihak yang membutuhkan. Atas perhatian semua pihak penulis ucapkan terimakasih banyak

Padang, 06 Juni 2023

Yulia Delma Wita



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Sumber-Sumber Penerimaan Daerah.....	12
B. Pendapatan Asli Daerah.....	13
C. Retribusi Daerah .....	15
D. Analisis Komparasi Penerimaan Retribusi Daerah .....	21
<b>BAB III PENDEKATAN PENELITIAN.....</b>	<b>25</b>
A. Bentuk Penelitian.....	25
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	25
C. Rancangan Penelitian .....	25

D. Teknik Analisis Data .....	28
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>30</b>
A. Gambaran Umum Instansi.....	30
B. Hasil Analisis Data dan Pembahasan .....	31
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>65</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persentase Tingkat Kemandirian Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2016-2021.....	2
Tabel 1.2 Daftar Daerah dengan Tingkat Kontribusi Daerah dan Realisasi Retribusi Daerah terhadap Realisasi PAD Terendah di Sumatera Barat Tahun 2016-2021.....	5
Tabel 2.1 Kriteria Efektifitas.....	21
Tabel 2.2 Kriteria Efisiensi .....	22
Tabel 2.3 Kriteria Kontribusi .....	23
Tabel 2.4 Kriteria Laju Pertumbuhan .....	24
Tabel 4.1 Rasio Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Tiap Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2018-2021.....	32
Tabel 4.2 Rasio Efisiensi Penerimaan Retribusi Daerah Tiap Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2018-2021.....	36
Tabel 4.3 Rasio Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Total PAD Tiap Kabupaten di Sumatera Barat Tahun 2018-2021.....	38
Tabel 4.4 Rasio Laju Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Daerah Tiap Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2018-2021.....	42
Tabel 4.5 Rasio Efektivitas Tertinggi Jenis Retribusi Daerah Tiap Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2018-2021.....	45
Tabel 4.6 Rasio Kontribusi Tertinggi Jenis Retribusi Daerah Terhadap Total PAD Tiap Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2018-2021.....	50
Tabel 4.7 Rasio Laju Pertumbuhan Tertinggi Jenis Retribusi Daerah Tiap Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2018-2021.....	53
Tabel 4.8 Rasio Rata-Rata Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2018-2021.....	57
Tabel 5.1 Kesimpulan .....	59

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Grafik Rata-Rata Rasio Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021 .....	35
Gambar 4. 2 Grafik Rata-Rata Rasio Efisiensi Penerimaan Retribusi Daerah Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021 .....	37
Gambar 4. 3 Grafik Rata-Rata Rasio Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah terhadap Total PAD Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021 .....	41
Gambar 4. 4 Grafik Rata-Rata Rasio Laju Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Daerah Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021.....	44

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Permohonan Penelitian dari Fakultas.....	65
Lampiran 2 : Bukti Pengambilan Data di Web. BPK Provinsi Sumatera Barat ...	66
Lampiran 3 : Rasio Efektivitas Anggaran dan Realisasi Penerimaan Per Jenis Retribusi Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021 .....	68
Lampiran 4 : Rasio Efisiensi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2019.....	107
Lampiran 5 : Rasio Kontribusi Penerimaan Per Jenis Retribusi Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021 ...	109
Lampiran 6 : Rasio Laju Pertumbuhan Penerimaan Per Jenis Retribusi Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021 ...	144

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia secara resmi menganut otonomi daerah yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Kemudian mengalami dua kali perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah adalah perwujudan dari sistem pemerintahan desentralisasi, yaitu adanya perpindahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah. Tujuan Pelaksanaan otonomi daerah untuk mewujudkan pemerintah daerah yang mandiri dalam meningkatkan pelayanan pemerintahan, memajukan kesejahteraan masyarakat dan memberdayaan masyarakat (Utami, 2018)

Berdasarkan pendapat Halim (2014), Kemandirian keuangan daerah diharapkan bisa terwujud dengan otonomi daerah karena tentunya pemerintah pusat menyadari bahwa pemerintah daerah itu sendiri yang paling mengetahui kondisi daerahnya, baik dari segi permasalahan yang ada sampai kepada sumber pendapatan yang bisa digali oleh pemerintah daerah tersebut. Pemerintah daerah dapat dikatakan hampir mampu dalam

melaksanakan otonomi daerah secara mandiri apabila tingkat kemandirian yang dicapai lebih besar dari 50%. Namun faktanya, hanya sedikit pemerintah daerah di Indonesia yang bisa dikatakan mandiri secara keuangan. Berdasarkan hasil *review* BPK RI tahun 2020, sebanyak 443 dari 503 pemerintah daerah di kategorikan belum mandiri (Nadia, 2021). Untuk itu kita perlu mengetahui Kabupaten/Kota di Sumatera Barat berdasarkan tingkat kemandirian keuangan daerah. Berikut data yang terkait dengan hal tersebut dimana data diambil dari situs website Rangkang Data yang diolah lagi oleh penulis :

Tabel 1.1  
Persentase Tingkat Kemandirian Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2016-2021

No	Kabupaten/ Kota	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata
1	Kab. Agam	11,72%	11,73%	7,17%	8,18%	7,85%	9,15%	9,30%
2	Kab. Dhamasraya	6,45%	10,43%	9,11%	7,74%	8,37%	8,46%	8,43%
3	Kab. Kepulauan Mentawai	4,61%	7,39%	4,97%	3,97%	4,19%	3,81%	4,82%
4	Kab. Lima Puluh Kota	5,77%	9,39%	5,84%	6,86%	6,40%	6,33%	6,77%
5	Kab. Padang Pariaman	5,38%	10,18%	6,45%	6,73%	8,11%	8,57%	7,57%
6	Kab. Pasaman	9,15%	14,29%	10,12%	9,51%	9,05%	8,76%	10,15%
7	Kab. Pasaman Barat	8,53%	14,83%	9,21%	8,62%	9,90%	11,77%	10,48%
8	Kab. Pesisir Selatan	7,47%	11,76%	8,10%	7,93%	8,15%	8,62%	8,67%
9	Kab. Sijunjung	8,68%	11,06%	8,40%	8,41%	9,82%	9,46%	9,30%
10	Kab. Solok	5,21%	9,90%	5,87%	5,95%	0,62%	6,24%	5,63%
11	Kab. Solok Selatan	6,59%	9,49%	7,62%	7,43%	8,92%	9,29%	8,22%
12	Kab. Tanah Datar	10,01%	14,11%	9,42%	9,69%	10,23%	9,70%	10,53%
13	Kota Bukittinggi	11,02%	15,67%	14,65%	15,24%	12,20%	13,33%	13,69%
14	Kota Padang	19,90%	26,22%	22,59%	23,24%	23,06%	24,25%	23,21%
15	Kota Padang Panjang	12,79%	15,03%	14,40%	13,37%	14,50%	16,32%	14,40%
16	Kota Pariaman	4,78%	4,83%	5,14%	5,44%	5,21%	6,20%	5,27%
17	Kota Payakumbuh	12,19%	15,78%	13,31%	13,06%	16,16%	13,33%	13,97%
18	Kota Sawahlunto	9,07%	10,68%	8,05%	8,95%	10,32%	8,61%	9,28%
19	Kota Solok	7,34%	7,01%	7,20%	6,77%	7,43%	7,75%	7,25%

Sumber: <http://sumbar.bpk.go.id/rangkang-data/> (diolah)

Berdasarkan data pada tabel 1.1 di atas, dapat di simpulkan bahwa rata-rata persentase tingkat kemandirian pemerintah daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016-2021 masih jauh dari yang diharapkan. Daerah yang memiliki tingkat kemandirian terendah adalah kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 4,82%. Selanjutnya, Kota Pariaman dan Kabupaten Solok yang masing-masing berada dalam angka 5%. Kemudian, persentase kemandirian yang tinggi dari Kabupaten/Kota di Sumatera Barat adalah kota Padang 23,21%. Artinya, tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat masuk kedalam kategori rendah sekali (Bps, 2020). Hal ini mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap bantuan dari pemerintah pusat menjalankan roda pemerintahannya.

Mahmudi (2010) menyatakan peningkatan kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain seperti bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Salah satu aspek penyelenggaraan otonomi daerah adalah tercapainya kemandirian daerah yang erat kaitannya dengan besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dihasilkan oleh suatu daerah. Apabila sumber-sumber yang mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) meningkat, maka akan terjadi peningkatan PAD. Namun pengelolaan dan pelaksanaan yang optimal harus ada agar sumber-sumber ini meningkat. (Ratdiananto et al., 2016).



Oleh sebab itu, pemerintahan daerah diharuskan untuk memaksimalkan pengelolaan serta meningkatkan penerimaan PAD melalui salah satu sumbernya yaitu retribusi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Semenjak muncul pandemi *Coronavirus Disease* (Covid-19), perasaan cemas masyarakat semakin meningkat. karena aspek kesehatan terancam, demikian pula aspek keuangan yang berkaitan dengan ekonomi masyarakat. Virus ini pertama kali muncul pada Desember 2019 di Wuhan, Provinsi Hubei, China. Pada bulan Maret 2020, Covid-19 menyebar dengan cepat ke seluruh Indonesia, termasuk di Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat memiliki 12 Kabupaten dan 7 Kota di Pulau Sumatera, dengan memiliki karakteristik yang berbeda-beda untuk setiap daerah di Kabupaten/Kotanya. Bagaimana penerimaan PAD dan Retribusi daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada era pra dan selama pandemi *Covid-19*.

Untuk itu kita perlu mengetahui penerimaan retribusi daerah di Sumatera Barat dan seberapa besar kontribusi retribusi daerah terhadap PAD pada era dan selama pandemi Covid-19. Oleh karena itu penulis menganalisa penerimaan retribusi daerah kabupaten/kota terendah di Sumatera Barat pada periode 2016-2021

**Tabel 1.2**  
**Daftar Daerah dengan Tingkat Kontribusi Daerah dan Realisasi Retribusi Daerah terhadap Realisasi PAD Terendah di Sumatera Barat Tahun 2016-2021**

Kab/Kota	Tahun	PAD	Retribusi daerah	%Retribusi Daerah terhadap PAD	Ket
Kab. Kep. Mentawai	2016	41.948.183.104,73	4.476.774.736,00	10,67%	PAD & Retribusi daerah turun dari 2019-2021
	2017	67.862.676.598,42	10.515.993.799,00	15,50%	
	2018	45.358.184.273,56	11.448.181.116,00	25,24%	
	2019	40.203.645.065,98	12.726.370.684,00	31,65%	
	2020	34.905.673.555,51	5.976.710.358,00	17,12%	
	2021	31.638.013.029,37	3.033.172.955,00	9,59%	
Rata-Rata		43.652.729.271,26	8.029.533.941,33	18,39%	
Kab. Solok Selatan	2016	51.138.125.857,00	1.164.697.300,00	2,28%	PAD naik sedangkan Retribusi Daerah turun dari 2019-2020
	2017	75.505.887.736,93	1.047.275.595,50	1,39%	
	2018	60.545.296.360,43	922.009.350,00	1,52%	
	2019	67.842.785.844,00	1.362.801.219,00	2,01%	
	2020	76.864.310.841,81	1.199.290.189,50	1,56%	
	2021	80.459.853.847,00	1.235.018.343,00	1,53%	
Rata-Rata		68.726.043.414,53	1.155.181.999,50	1,68%	
Kota Pariaman	2016	29.680.784.157,91	3.371.154.780,00	11,36%	PAD turun sedangkan retribusi naik dari tahun 2019-2020
	2017	30.881.846.112,42	3.369.770.163,00	10,91%	
	2018	32.213.303.036,69	4.184.671.257,00	12,99%	
	2019	36.665.174.233,13	4.390.195.539,00	11,97%	
	2020	32.961.765.488,86	6.635.664.791,00	20,13%	
	2021	38.032.040.569,97	11.325.131.000,00	29,78%	
Rata-Rata		33.405.818.933,16	5.546.097.921,67	16,60%	
Kota Sawahlunto	2016	53.388.553.982,54	2.701.515.584,00	5,06%	PAD naik sedangkan Retribusi Daerah turun dari 2019-2020
	2017	62.459.787.921,37	3.828.111.382,00	6,13%	
	2018	47.227.132.335,45	3.533.959.570,00	7,48%	
	2019	57.170.993.865,09	3.625.062.865,00	6,34%	
	2020	59.537.385.897,66	2.788.116.593,00	4,68%	
	2021	51.475.336.271,45	2.731.559.922,00	5,31%	
Rata-Rata		55.209.865.045,59	3.201.387.652,67	5,80%	
Kota Solok	2016	42.117.207.737,98	6.229.664.111,00	14,79%	PAD & Retribusi daerah turun dari 2019-2021
	2017	41.852.774.058,12	6.190.178.549,00	14,79%	
	2018	40.742.809.270,40	5.784.031.674,00	14,20%	
	2019	41.651.875.802,05	5.643.419.479,00	13,55%	
	2020	40.546.983.369,47	4.078.343.699,00	10,06%	
	2021	42.410.154.725,27	4.398.701.913,00	10,37%	
Rata-Rata		41.553.634.160,55	5.387.389.904,17	12,96%	

*Sumber: CaLK pada LHP atas LKPD Pemkab/Pemkot di BPK Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2021 (diolah, 2023)*

Berdasarkan Tabel 1.2. di atas dapat dilihat secara rata-rata kontribusi realisasi penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 yang termasuk kedalam kategori kurang. Kontribusi paling tinggi Kab. Kepulauan Mentawai sebesar 18,39% yang terendah Kab. Solok Selatan sebesar 1,68%. Artinya mempengaruhi realisasi penerimaan retribusi daerah yang kurang berkontribusi terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Gempito, 2022) dengan hasil penelitian bahwa peranan retribusi daerah terhadap PAD masih kecil.

Sementara itu dapat dilihat bahwa penerimaan PAD dan Retribusi daerah Kab/Kota di Sumatera Barat mengalami penurunan rata-rata mulai dari tahun 2019-2020. Walaupun masih ada beberapa tahun yang mengalami kenaikan dari tahun 2019-2020. Artinya pandemi Covid-19 juga mempengaruhi penerimaan retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penurunan yang terjadi di tahun 2020 adalah penurunan yang secara drastis disebabkan karena ada beberapa jenis retribusi daerah yang dipengaruhi pandemi Covid-19. Salah satu faktor penurunan penerimaan retribusi daerah juga mengalami penurunan. Faktor utama penurunan tersebut dikarenakan, menurunnya minat masyarakat dalam melakukan perizinan di tahun 2020 (Mais & Yuniara, 2020). Melihat kondisi tersebut,

beberapa pemerintah daerah provinsi yang memiliki kasus Covid-19 terbanyak juga memberlakukan insentif pada retribusi daerah. Pengeluaran insentif pada retribusi daerah berupa pengurangan beban biaya tetap bagi masyarakat dan mengurangi beban pembayaran retribusi di masa pandemi Covid-19. Pemberlakuan insentif ini meliputi penurunan tarif dan penghapusan sanksi administratif.

Pemberlakuan insentif pada retribusi daerah sebagai bentuk langkah pemerintah dalam menjaga nilai pendapatan retribusi daerah itu sendiri (Bapeda DKI Jakarta, 2021). Hal ini dikarenakan, retribusi daerah akan berdampak langsung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seperti masa pandemi Covid-19 saat ini, PAD juga mengalami penurunan. Menurut [Djpk.kemenkeu.go.id](http://Djpk.kemenkeu.go.id), selama masa pandemi Covid-19, realisasi PAD di beberapa Kabupaten/ Kota Indonesia mengalami penurunan termasuk salah satunya di Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan dari hasil penelitian (Sudarmana & Sudiarta, 2020) dan (Sipakoly, 2016) menemukan bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD. Semakin meningkatnya penerimaan dari pajak dan retribusi daerah akan mengakibatkan semakin meningkat pula PAD yang akan diterima oleh pemerintah. Sedangkan (Sartika et al., 2019) capaian retribusi daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat termasuk pada kriteria efektif, namun dari perhitungan pertumbuhan tergolong tidak berhasil, dan dari kontribusinya terhadap PAD termasuk pada kriteria kurang baik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tingkat efektivitas, efisiensi, kontribusi, laju pertumbuhan dan rata-rata pertumbuhan retribusi daerah di kab/kota di Sumatera barat dengan menggunakan perbandingan dan mengklasifikasikan kriterianya. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi daerah banyak kendala yang dihadapi sehingga target PAD yang berasal dari retribusi tidak tercapai. Pemungutan retribusi daerah dapat dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Perhitungan efektivitas, efisiensi, kontribusi, laju pertumbuhan pemungutan retribusi daerah dan perhitungan rata-rata pertumbuhan pemungutan tersebut.

Dengan demikian, pandemi memang mempengaruhi penerimaan retribusi daerah berdasarkan data dan peristiwa yang digambarkan kondisi Kabupaten/kota di Sumatera Barat Secara akumulatif memang terlihat menurun tapi bisa jadi sebagian/semua jenis retribusi daerah saja yang menurun. Oleh karena itu, pentingnya penulis melakukan analisis ini bertujuan memperlihatkan kepada pemerintah daerah bahwa memang terdapat perbandingan ketika penerimaan retribusi daerah sebelum pandemi dan selama pandemi. Penurunan inilah yang menjadi urgensi dan perlu dilirik agar tidak berkelanjutan dan kita mengharapkan pemerintah daerah bisa lebih fleksibel dalam mencari solusi untuk kesejahteraan masyarakatnya dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Prioritas Pemerintah daerah harus menciptakan kebijakan yang lebih kompeten dan

mengelolanya dengan cara yang efektif dan efisien. Diharapkan penerimaan retribusi daerah bisa meningkat setelah masa pandemi berakhir.

Oleh karena itu retribusi daerah merupakan salah satu komponen yang dapat memberikan sumbangan bagi penerimaan daerah. Penulis tertarik untuk menganalisis penerimaan retribusi daerah tahun sebelum pandemi dan selama pandemi berlangsung. Selain itu, penulis ingin mengetahui jenis retribusi apa saja yang terdampak karena adanya pandemi. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis tertarik mengangkat judul Tugas Akhir ini mengenai “ANALISIS KOMPARASI PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT PADA ERA PRA DAN SELAMA PANDEMI COVID-19”.

Topik penelitian penulis memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya seperti Tugas Akhir (Yandita, 2021) Dillanof Yandita BP 18 dan (Vadila, 2020) Cici Vadila Bp17. Pada penelitian penulis menganalisis menggunakan 5 metode dan membandingkan 19 kab/kota di Sumatera Barat tahun anggaran selama 4 tahun terakhir yaitu 2018-2021 dengan permasalahan pandemi *Covid-19* saat ini dan untuk tiap jenis retribusi daerah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengajukan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis efektivitas penerimaan retribusi daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada era pra dan selama *Covid-19*?

2. Bagaimana analisis efisiensi penerimaan retribusi daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada era pra dan selama *Covid-19*?
3. Bagaimana analisis kontribusi penerimaan retribusi daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada era pra dan selama *Covid-19*?
4. Bagaimana analisis laju pertumbuhan penerimaan retribusi daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada era pra dan selama *Covid-19*?
5. Bagaimana analisis rata-rata pertumbuhan penerimaan retribusi daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada era pra dan selama *Covid-19*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dari itu penulis mempunyai tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan retribusi daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada era pra dan selama *Covid-19*.
2. Untuk mengetahui tingkat efisiensi penerimaan retribusi daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada era pra dan selama *Covid-19*.
3. Untuk mengetahui tingkat kontribusi penerimaan retribusi daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada era pra dan selama *Covid-19*.
4. Untuk mengetahui tingkat laju pertumbuhan penerimaan retribusi daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada era pra dan selama *Covid-19*.
5. Untuk mengetahui tingkat rata-rata pertumbuhan penerimaan retribusi daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada era pra dan selama *Covid-19*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Bagi penulis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan mengukur sejauh mana ilmu pengetahuan yang mampu diserap penulis dari teori-teori di perkuliahan.

##### 2. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan bisa menjadi bahan informasi agar pemda di Sumatera Barat bisa mengatasi turunnya penerimaan retribusi daerah dan membuat kebijakan yang lebih berkompeten agar tidak berkelanjutan.

##### 3. Bagi Universitas/Akademis

Sebagai bahan referensi dan tambahan wawasan informasi kepada mahasiswa Universitas Negeri Padang.

##### 4. Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan penambah wawasan ilmu pengetahuan dan referensi yang akan menjadi pertimbangan bagi peneliti di masa mendatang yang ingin menganalisis berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.